



SALINAN

BUPATI MADIUN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Madiun.
7. Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Madiun.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Madiun.
9. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Madiun.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.
11. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, guru dan semua warga sekolah, pemerintah dan Negara.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak
13. Kecamatan layak anak adalah kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
14. Desa/kelurahan layak anak adalah desa/kelurahan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

BAB II

PRINSIP PENYUSUNAN RAD-KLA

Pasal 2

Prinsip penyusunan RAD-KLA dilaksanakan berdasarkan:

- a. afirmatif, yaitu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar anak memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan atau tindakan yang memberi keistimewaan pada anak;

- b. non diskriminasi, yaitu pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup semaksimal mungkin, dan yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan perkembangan anak adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- f. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2026 diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi klaster:
 - a. kelembagaan;
 - b. hak sipil dan kebebasan;
 - c. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - f. perlindungan khusus; dan
 - g. kecamatan, desa/kelurahan layak anak.
- (2) Indikator dalam rangka pemenuhan hak anak meliputi 7 (tujuh) klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Madiun Layak Anak Tahun 2022-2026 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN
LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI DAERAH
KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

Dalam rangka pencapaian sasaran KLA, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA (RAD KLA) merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Penyusunan RAD KLA mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, Rencana Aksi Nasional penyelenggaraan KLA, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dalam Menyusun RAD KLA Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan OPD terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA di Kabupaten Madiun.

RAD KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan untuk menyeleggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator, yaitu : (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; (4) anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); (6) pelembagaan partisipasi anak; (7) pencegahan perkawinan anak; (8) penguatan kapasitas lembaga konsultasi

penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga; (9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI); (10) standarisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas kesehatan; (13) status gizi balita; (14) Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak; (16) lingkungan sehat; (17) ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor (IPS) rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah Anak (SRA); (20) ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak; (21.a) pelayanan bagi anak korban kekerasan dan eksploitasi; (21.b) anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); (22.a) pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik; (23.a) pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku); dan (24.b) pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yaitu dalam rangka pengembangan KLA dan untuk membangun inisiatif Pemerintahan Daerah khususnya di Kabupaten Madiun yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak di Kabupaten Madiun. Penyusunan RAD-KLA sebagaimana dimaksud dilandasi ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang memberikan definisi bahwa RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Selain dari pada itu tujuan disusunnya RAD-KLA yaitu :

- 1) Meningkatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Madiun, masyarakat, media massa, dan dunia usaha di Kabupaten Madiun dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;

- 2) Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- 3) Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

RAD KLA memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Madiun yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik, OPD, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya.

Guna mendukung keberlanjutan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Madiun, dimana pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin dalam mewujudkan daerah yang layak anak dan bertanggungjawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Berdasarkan data-data tersebut, maka ditetapkan target peningkatan melalui matriks Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2026

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	KLASTER KELEMBAGAAN										
1	Peraturan Daerah (Perda) tentang KLA	Fasilitasi Penyusunan Perdatentang KLA (EvaluasiRaperda)	Regulasi Perda	Kabupaten	1	-	1	-	-	-	DINAS PPKB PPPA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DPRD
2	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan Kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT KLA aktif	Kabupaten(* Pembaruan SK)	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD KECAMATAN KEPALA DESA / LURAH BAGIAN HUKUM Ketentuan: a. SK Bupati GT-KLA Kabupaten 1 b. SK Kecamatan GT-KLA Kecamatan-15 c. SK Desa GT KLA Desa198 d. SK Kelurahan GT KLA Kelurahan-8
				Kecamatan	4	11	15	15	15	15	
Desa	0	0	15	30	45	60					
Kelurahan	0	0	2	2	2	2					
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)KLA	Jumlah OPD yang memiliki RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	OPD	1	1	-	-	-	-	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Koordinasi Kabupaten Layak Anak	Jumlah Dinas yang melakukan Evaluasi KLA	Gugus Tugas KLA (Rakor)	3	4	4	4	4	4	DINAS PPKBPPPA
			Evaluasi KLA Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan		0	-	1	-	1	-	DINAS PPKB PPPA
		Fasilitasi penyusunan rancangan akhir RKPD	Jumlah dinas yang menyusun RKPD (Isu Pengarusutamaan Hak Anak)	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
		Pembinaan dan pengawasan pembentukan UPTD PPA	Jumlah OPD Yangmembentuk UPTD PPA	Kabupaten	0	-	-	-	1	-	DINAS PPKB PPPA
		Penyusunan Rencana Kerja Dinas bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen Rencana Kerja Dinas	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
		Pemantauan dan evaluasi bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
		Pelaksanaan Kajian bidang Perlindungan Anak	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pembaharuan Profil KLA	Jumlah dinas yang memiliki Profil KLA dan diperbaharui Secara berkala	Kabupaten	1	-	1	-	1	-	DINAS PPKB PPPA
		Fasilitasi Anak (KGPPA) pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA	Kabupaten	4	3	3	3	3	3	DINAS PPKBPPPA
		Fasilitasi TOT Fasilitator KLA (DIKLAT)	Kegiatan TOT Fasilitator	Kegiatan	0	-	1	-	1	-	DINAS PPKB PPPA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket Leaflet Poster Banner Buku Saku Baliho Video Medsos (7)	4	5	5	6	6	7	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan	Kecamatan -15 Desa-198 Kelurahan-8	0 0 0	0 0 0	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD BAPPEDA KECAMATAN DESA KELURAHAN Kriteria Kecamatan Layak Anak meliputi: a. Tersedia kebijakan/peraturan kecamatan tentang perlindungan anak. b. Tersedia data/profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya. c. Forum Anak Kecamatan aktif dan terlibat dalam Musrenbang Kecamatan. d. Tersedia kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya. e. Forum anak kecamatan berperan sebagai 2P. f. Tersedia mekanisme penanganan korban kekerasan pada anak. g. Persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											h. Tidak ada perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir. i. Tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir. j. Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal. k. Tersedia ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik. l. Tersedia Kelompok konsultasi keluarga. m. Ruang publik bebas asap rokok. n. Ada layanan PAUD-HI. o. Ada Puskesmas dengan pelayanan ramah anak. p. Ada ruang/taman bermain bagi anak. Kriteria Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi: a. Tersedia kebijakan/peraturandes/kelurahan tentang perlindungan anak. b. Tersedia data/profil anak desa/kelurahan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan karakteristik lainnya.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											c. Forum Anak Desa/Kelurahan aktif dan terlihat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan. d. Tersedia kelompok olahraga/kesenian anak/lainnya. e. Forum Anak Desa/Kelurahan berperan sebagai 2P. f. Persentase anak mendapatkan kutipan akta kelahiran melebihi angka persentase rata-rata kabupaten. g. Tidak perkawinan anak dalam kurun waktu satu tahun terakhir. h. Tidak ada gizi buruk dalam kurun waktu satu tahun terakhir. i. Semua anak mendapat pendidikan formal/non-formal. j. Tersedia Ruang baca anak, layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaannya ILA diruang publik. k. Tersedianya kelompok konsultasi keluarga. l. Tersedianya ruang publik bebas asap rokok. m. Tersedianya layanan PAUD-HI. n. Tersedianya ruang/taman bermain bagi anak.

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyusunan panduan kapasitas Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa	Jumlah dokumen Panduan fasilitasi pemberdayaan Anak di desa	Dokumen	0	-	1	-	-	-	DINAS PPKB PPPA
		Fasilitasi Pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa	Kecamatan Desa Kelurahan	0 0 0	0 0 0	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD KECAMATAN DESA KELURAHAN
		Pelatihan bagi SDMPATBM Tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual anak melalui media online	Jumlah PATBM Tingkat Desa-198 Jumlah PATBM-Tingkat Kelurahan-8 Jumlah SDM PATBM yang terlatih Perlindungan Anak	SK Kepala Desa Penetapan PATBM-Desa SK.Kelurahan Penetapan PATBM-Kelurahan Orang	0 0 200 Peserta	10 2 50 Peserta	10 2 40 Peserta	10 2 40 Peserta	10 2 40 Peserta	10 2 40 Peserta	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD KECAMATAN DESA KELURAHAN

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak	Fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) di Daerah	Jumlah APSAI aktif	Kabupaten	0	-	1	-	-	-	DINAS PPKB PPPA BAPPEDA DPMPTSP FORUM CSR KAB.MADIUN
		Fasilitasi penguatan kelembagaan PUHA bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	SDM Lembaga	0	0	-	1	-	-	DINAS PPKB PPPA
		Fasilitasi Penguatan Peran PKK melalui 10 Program Pokok PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang,	Jumlah Program/ Panduan 10 Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/ Kelurahan Layak Anak meliputi:	Dokumen Laporan	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD TP-PKK

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat)	a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Kegiatan	9	9	9	9	9	9	
			b. Gotong Royong	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	
			c. Pendidikan dan Keterampilan	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	
			d. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	
			e. Pangan	Kegiatan	8	8	8	8	8	8	
			f. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	
			g. Kesehatan	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	
			h. Kelestarian Lingkungan Hidup	Kegiatan	7	7	7	7	7	7	
			i. Perencanaan Sehat	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) diDaerah	Jumlah JMPA aktif	Kabupaten	0	-	-	1	1	-	DINAS PPKB PPPA DINAS KOMINFO MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK MEDIA SOSIAL

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	0	-	-	1/30 Orang	1/30 Orang	-	DINAS PPKB PPPA DINAS KOMINFO MEDIA CETAK MEDIA ELEKTRONIK MEDIA SOSIAL
		Fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi organisasi keagamaan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA Jumlah lembaga keagamaan	Kegiatan/SDM Lembaga yang terlibat	0/ -	1/ 60 Peserta	0/ -	1/ 60 Peserta	0/ -	1/ 60 Peserta	DINAS PPKB PPPA KEMENAG ORMAS KEAGAMAAN
		Fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM Akademisi dan Lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA Jumlah perguruan Tinggi dan Lembaga riset	a.MoU/Kegiatan/SDM Lembaga yang terlibat di dalam wilayah Kabupaten Madiun	1	-	1	1	-	-	DINAS PPKB PPPA PERGURUAN TINGGI

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				b. MoU/Kegiatan/SDM Lembaga yang terlibat diluar wilayah Kabupaten Madiun	3	1	1	1	1	1	
				c.Kegiatan Fasilitasi penguatan pelembaraan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	0	-	-	1	-	-	
		Fasilitasi Pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial	Jumlah Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di Luar Panti Sosial	Kabupaten	0	-	-	-	-	1	DINAS PPKB PPPA DINSOS

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II KLUSTERHAKSIPILDANKEBEBASAN											
1	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Peningkatan cakupan Kepemilikan akta Kelahiran bagi Penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan Kepemilikan akta Kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	% Kecamatan Desa	96,70 15 206	98,30 15 206	98,60 15 206	98,80 15 206	98,90 15 206	99 15 206	DISPENDUKCAPIL
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kecamatan yang Menerapkan KIA	Kecamatan % Jumlah	15 62 104.940 164.080	15 63	15 64	15 65	15 65	15 66	
		Sosialisasi dan advokasi Kebiasaan pemenuhan Hak sipil Anak melalui Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasikan kebijakan pemenuhan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara Gratis	Kecamatan	15	15	15	15	15	15	DISPENDUKCAPIL DINAS PPKB PPPA
2	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Penyelenggaraan sistem elektronik yang arnan,handal, dan bertanggung jawab	Persentase Konten internet bermuatan negatif yang ditangani	Kata	24 kata yang dilakukan Pemblokiran	24	24	24	25	26	DINAS KOMINFO

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penyebaran Infomasi Layak Anak	Jumlah Konten Informasi Layak Anak yang tersebar melalui Forum Anak	Eksemplar (Produk Konten cetak,digital)	1	2	2	3	3	4	DINASKOMINFO
			Jumlah Kecamatan yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>abous theline</i> dan <i>through the line</i>	Kecamatan	Belum ada	-	1	2	3	4	
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui <i>Media below the line</i>	Kegiatan	Belum ada	-	1	2	3	4	
		Fasilitasi pemenuhan hak Anakatas Informasi Layak Anak (ILA)	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan	15	15	15	15	15	15	DINAS PPKB PPPA DINAS KOMINFO
			Jumlah Pusa tInformasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten	Belum ada	-	-	1	1	1	
				Kecamatan	Belum ada	-	-	-	1	1	

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Perpustakaan yang Terakreditasi	Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten) memiliki layanan perpustakaan Anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Jumlah Sekolah	10	12	14	16	18	20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Nilai Budaya Kegemaran membaca	Mengadakan kegiatan lomba minat baca (bertutur, duta baca dsb)	Jumlah kegiatan pembudayaan kegemran membaca dan literasi	Jumlah Kegiatan	2	3	5	5	6	6	
5	Jumlah Penerima manfaat	Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan dan sosialisasi	Tingkat Kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah Peserta	3	3	5	5	6	6	
		Melaksanakan Kegiatan pelatihan	Layanan perpustakaan berbasis inklusi	Jumlah Peserta	30	30	40	40	45	45	
		Sosialisasi ke masyarakat	Jumlah Pojok Baca Digital area publik di Kabupaten	Jumlah Pojok Baca	1	1	1	2	2	3	

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB				
						2022	2023	2024	2025	2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
6	Pelebagaanc Partisipasi Anak	Fasilitasi dan penguatan Kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif	Kabupaten Kecamatan	1 5	1 10	1 15	1 15	1 15	1 15	DINAS PPKB PPPA				
		Pelatihan bagi FA sebagai Pelopor dan Pelapor(2P)	Jumlah daerah yang memiliki FA sebagai 2P	Kecamatan	5	10	15	15	15	15		DINAS PPKB PPPA			
		Pelatihan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi FA	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak Dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)	Kabupaten Kecamatan	1 3	1 3	1 5	1 8	1 10	1 15			DINAS PPKB PPPA		
		Fasilitasi penguatan kapasitas Fasilitator Forum Anak	Jumlah daerah yang memiliki Fasilitator Forum Anak terlatih	Kabupaten Kecamatan	1 2	1 2	1 5	1 7	1 9	1 12				DINAS PPKB PPPA	
		Fasilitasi penguatan peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah daerah yang terliba dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten	1	1	1	1	1	1					DINAS PPKB PPPA
		Fasilitasi peningkatan partisipasi ForumAnak dalam perencanaan Pembangunan (PAPP)	Jumlah FA terlibat aktif dalam Musrenbang	Forum Anak Kabupaten Kecamatan	1 5	1 5	1 7	1 9	1 11	1 13					

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
III KLUSTERLINGKUNGANKELUARGADANPENGASUHANALTERNATIF											
1	Pencegahan Perkawinan Anak	Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan yangmenikah Sebelum berusia 18tahun	%	3	2,8	2,75	2,7	2,65	2,5	DINAS PPKB PPPA
		Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan Perkawinan Anak	Kabupaten Kecamatan Desa	1 15 206	1 15 206	1 15 206	1 15 206	1 15 206	1 15 206	DINAS PPKB PPPA
		Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah	Orang (dalam ribuan)	780	940	1040	1140	1240	1340	DINAS PPKBPPPA KEMENAG
		Penurunan angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun/ <i>Age SpeciftcFertilitu Rate (ASFR15-19)</i> (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	50.005	49.995	49.985	49.975	49.965	49.955	DISPENDUKCAPIL
		Penyiapan perencanaan Kehidupan berkeluarga bagi remaja	Media Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	21	21,2	21,4	21,6	22,0	22,3	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	90	90	90	90	90	100	DINAS PPKB PPPA KEMENAG
2	Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang Menerima bimbingan dan layanan pusaka Sakinah	Pasangan (dalam ribuan)	90	90	90	90	90	100	DINAS PPKB PPPA KEMENAG
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kabupaten	0	-	-	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
		Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) di Kabupaten yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	0	-	-	1	1	1	DINSOS

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pembinaan Keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	99,98	99,98	99,98	99,98	99,98	99,99	DISPENDUKCAPIL
			Jumlah keluarga Yang memiliki Balita pada lokus Prioritas yang mendapatkan promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengasuhan 1000 HPK dalam Pencegahan Stunting	Keluarga	19.949	20.05	20.15	20.25	20.35	20.40	DINAS PPKB PPPA
			Persentase keluarga yang melaksanakan Pengasuhan dan pendampingan Pembentukan karakter	%	25.,51	25,75	26,00	26,25	26,50	26,75	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi Pembentukan dan Pelayanan keluarga dan anggota keluarga di Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	0	-	-	10	10	12	DINSOS
		Penyediaan layanan Pendidikan yang Merata dan berkualitas	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
		Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	DISDIKBUD
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	-	1	1	1	1	DISDIKBUD

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	-	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat Yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	0	-	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA
3	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistic integratif	Jumlah satuan PAUD Yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	Jumlah	Belum ada	15	30	45	60	75	DISDIKBUD
			Jumlah satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	Jumlah	Belum ada	15	30	45	60	75	DISDIKBUD

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembinaan peningkatan Kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD	Orang	20	35	50	65	80	95	DISDIKBUD
4	Standarisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif	Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	15	18	20	20	21	21	DINSOS
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	2	2	2	2	2	2	DISDIKBUD
		Pelaksanaan standarisasi <i>day care</i> ramah Anak	Jumlah daerah yang mengembangkan <i>Daycare</i> ramah Anak	Kabupaten Kecamatan	1 3	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	DINAS PPKB PPPA

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penguatan Kapasitas Pesantren dalam memberikan Pengasuhan Alternatif bagi Santri/wati	Jumlah daerah yang membentuk pesantren ramah Anak	Kabupaten Kecamatan	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	KEMENAG
			Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren Ramah Anak	30	30	30	30	30	30	DISDIKBUD DINAS PPKB PPPA KEMENAG
			Jumlah model pesantren Ramah Anak	Model Pesantren	30	30	30	30	30	30	
			Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis Hak Anak	Pengasuh Pesantren	60	60	60	60	60	60	
5	Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik	Fasilitasi penyediaan Infrastruktur ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak Anak atas Lingkungan Ramah Anak	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN
			Pekan Nasional Keselamatan Jalan	Kabupaten	Belum Ada	-	-	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN

No.	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR (2021)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah daerah yang difasilitasi transportasi Angkutan umum Massal ramah Anak	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	
		Anak	Trayek Angkutan Massal Caruban-Gemarang Caruban-Dimong Dolopo-Suluk	Trayek	3	3	3	3	3	3	
			Jumlah pemberian bus Sekolah bantuan	Unit	4	4	4	4	5	5	DINAS PERHUBUNGAN DISDIKBUD
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS	Lokasi (Depan Alun-Alun Caruban)	1	1	1	2	3	3	
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk di Kabupaten	Lokasi	Belum ada	-	1	1	1	1	DINAS PERHUBUNGAN
			Shelter	Jumlah	2	2	2	2	2	2	
			Halte	Jumlah	17	17	17	18	18	18	
			APILL (Alat Pemberiisyarat Lalu Lintas)	Lokasi	2	2	2	2	2	2	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV	KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN										
1	Peralinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase peralinan difasilitas pelayanan Kesehatan	%	88,70	91	93	95	97	99	DINKES TP-PKK
			Persentase kunjungan neonatal	%	93,08	90	92	95	97	99	
		Skrining deteksi dini pra peralinan	Cakupan ibu hamil diskrining HIV dan Sifilis	%	85,43	100	100	100	100	100	
			Cakupan Ibu Hamil diskrining Hepatitis B	%	85,33	100	100	100	100	100	
2	Status Gizi Balita	Suplementasi vitamin A pada Balita	Persentase Balita Usia 6-59 Bulan Mendapatkan vitamin A	%	87,87	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5	
		Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	53,63	80,2	80,3	80,4	80,5	80,6	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P dalam Gizi	Jumlah FA Kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P Gizi melalui sosialisasi	FA	N/A	15	15	15	15	15	DINKES DINAS PPKB PPPA TP-PKK
		Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah FK Kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P Gizi melalui sosialisasi	FK	N/A	15	15	15	15	15	
3	Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun	Peningkatan gizi Anak di bawah usia dua tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	85,79	69	69,5	69,6	69,7	69,8	
		Fasilitasi peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Jumlah kelompok pendamping ASI yang difasilitasi pengetahuan ASI eksklusif	Kelompok	6	8	10	12	14	16	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Fasilitas Kesehatan Dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah Anak difasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai Standar utama	Jumlah	3	10	15	18	22	26	DINKES TP-PKK
			Jumlah rumah sakit terakreditasi paripurna	Jumlah	2	2	2	2	2	2	
		Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	206	100	100	100	100	100	
		Pelayanan Kesehatan Bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV,dan Sifilis	Persentase desa Mampu Profilaksis	%	0	100	100	100	100	100	
		Pemutusan penularan Hepatitis B dari Ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dar Ibu dengan HBsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari <24 jam setelah kelahiran	%	0	100	100	100	100	100	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Theraphy pencegahan TB bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase Balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	100	100	100	100	100	100	
		Kasus Kusta Anak	Jumlah kasus kusta Anak	Jumlah Absolut	0	100	100	100	100	100	
		Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase Puskesmas melakukan tatalaksana standar Pneumonia	%	26	100	100	100	100	100	
		Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	99,88	100	100	100	100	100	
		Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	%	100	100	100	100	100	100	
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan Napza	%	11,67	12	12,50	13	13,5	14	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Profil Kabupaten Sehat (apakah pakai indikator strata atau hanya laporan profil)	Kabupaten	5 tatanan	5 tatanan	7 tatanan	7 tatanan	8 tatanan	8 tatanan	
			Presentase tempat Pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	27,09	37	40	43	46	49	
			Persentase tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuaistandar	%	78,93	83	85	87	89	91	
		Promosi kesehatan	Presentase posyandu aktif	%	878	75,14	75,24	75,34	75,44	75,54	
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	Sambungan Rumah	7.168	0	0	0	0	0	DINAS PUPR PERUMDA AIR MINUM TIRTA DHARMA PURABAYA KABMADIUN

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	10,5	13,5	13,5	13,5	15	15	DINAS PUPR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	10,5	12	12	12	13,5	13,5	
			Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	4.217	4.613	5.013	5.413	5.813	6.213	
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan Layanan system Pengelolaan air limbah	KK	220	440	640	840	1.040	1.240	
			Jumlah Kepala Keluarga(KK) yang mendapatkan layanan system pengelolaan drainase lingkungan	Km	2,44	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan system pengelolaan persampahan	KK	81.481	85.072	94.741	133.951	133.249	143.095	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	15	20	35	40	45	50	DINAS PUPR DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Implementasi KTR	Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan	15	100	100	100	100	100	DINKES DISDIKBUD DINAS PPKB PPPA
		Sosialisasi Bahaya Rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah FA Kecamatan yang mendapatkan pengetahuan 2P Hebat Tanpa Rokok melalui sosialisasi	Forum Anak	0	15	15	15	15	15	DINAS PPKB PPPA KECAMATAN FORUM ANAK KECAMATAN
		Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	15	20	35	40	45	50	DINAS PUPR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
V PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTULUANG,DANKEGIATAN BUDAYA												
1	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	Angka	77.77	100	100	100	100	100	DISDIKBUD	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat	Angka	98.55	100	100	100	100	100		
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/M Ts/SMPLB/ Sederajat	Angka	101.33	100	100	100	100	100		
		Peningkatan Perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	79.8	79.9	80	80.1	80.2	80.3		
			Sosialisasi Sekolah inklusi	Sekolah	N/A	453	503	553	603	653		DISDIKBD DINAS PPKBPPPA DINSOS
			Pengembangan Sekolah- sekolah inklusi	Sekolah	2	22	97	172	247	322		

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA disetiap jenjang pendidikan	Jumlah Madrasah yang Ramah Anak	Madrasah	71	71	71	71	71	71	DISDIKBUD KEMENAG
			Jumlah MA yang Ramah Anak	Madrasah	4	4	4	4	4	4	
			Jumlah SRA yang sudah di SK-kan	Sekolah	40	628	658	688	718	748	
			Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang pemenuhan hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA Dan SRA)	PAUD.TK.RA /SD/MI/ MTs/SMA/ MA/SMK/	788	790	792	794	796	798	
			Jumlah sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	Sekolah	N/A	N/A	15	30	45	60	
			Sekolah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Sekolah	4	4	5	6	7	8	

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Promosi Pelaksanaan Kebijakan Kreativitas dan Budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	DISDIKBUD DISPARPORA
		Peningkatan Karakter Peserta Didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100	100	100	100	100	100	DISDISKBUD
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Jumlah sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka	%	N/A	418	468	518	568	618	
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	5	10	15	20	25	30	DINKES DINAS KETAHAN PANGAN dan PERTANIAN DISDIKBUD BPOM KEMENAG

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Sekolah	5	10	15	20	25	30	DINKES DINAS KETAHANAN PANGAN dan PERTANIAN DISDIKBUD BPOM KEMENAG
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Madrasah	25	25	25	25	25	25	
		Intervensi Keamanan pangan disekolah (SD, SMP,SMA sederajat)	Tersedianya Kantin sehat di sekolah	%	N/A	80	85	90	95	100	DINKES DISDIKBUD KEMENAG
			Tersedianya Kantin sehat di madrasah	Lokasi	25	25	25	25	25	25	
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah Sekolah yang melaksanakan sosialisasi pencegahan Narkoba	Sekolah	48	53	58	63	68	73	DISDIKBUD DINKES BAKESBANGPOL BNN

No	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pembinaan dan penghargaan Gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya Lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	17	19	21	23	25	27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DISDIKBUD
			Jumlah madrasah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional dan mandiri)	Madrasah	25	25	25	25	25	25	DISDIKBUD KEMENAG
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah desa/kecamatan yang menerapkan SPAB	Kabupaten	N/A	1	2	3	4	5	BPD DINASPMD

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	
						2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
VI	PERLINDUNGAN KHUSUS											
21a.	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi	Fasilitasi pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevalensi kekerasan terhadap Anak	%	0,008%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	DINAS PPKB PPPA	
					69%	69%	70%	83%	85%	86%	KEPOLISIAN	
			Jumlah Kecamatan/Kelurahan/desa yang telah menerbitkan kode etik bagi Penyelenggara perlindungan anak	Kecamatan/Desa	Kec.13	0	15	15	15	15	15	KECAMATAN
					Desa18	0	20	30	30	30	30	DESA
			Jumlah Kecamatan/Kelurahan/desa yang diadvokasi tentang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan/Desa	Kec.13 Desa18	0 0	15 20	15 30	15 30	15 30	KECAMATAN DESA	
			Jumlah daerah yang dilatih tentang disiplin positif	Kabupaten	0	0	0	1	1	1	BAGIAN HUKUM	

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Zonasi yang dibuat untuk Internet Anak	Kabupaten	0	0	0	1	1	1	DISKOMINFO DINAS PPKB PPPA
			Jumlah desa/kelurahan yang menca- nangkan Desa/Kelurahan Tanpa Kekerasan	Kelurahan /Desa	40 Desa/K el	40	40	40	40	40	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD DESA/KELURAHAN
			Jumlah Kecamatan/ Kelurahan/desa yang mempunyai/ mengembangkan system monitoring dan evaluasi perlindungan Anak dari kekerasandan Eksplotasi	Kecamatan/ Kelurahan/ desa	Kec.13 Desa18	15 20	15 20	15 30	15 30	15 30	KECAMATAN DESA
			Jumlah daerah yang mempunyai ketersediaan SDM dan/sarana (Molin) yang memadai untuk layanan anak korban kekerasan dan penelantaran	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	DINAS PPKB PPPA FORUM ANAK

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah yang memiliki FA sebagai 2P dalam mencegah KTA	Kec.	15	15	15	15	15	15	
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping FA) yang terlatih dalam penyusunan profil Anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kec.	0	0	15	0	15	0	
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan anak korban kekerasan	Jumlah daerah yang memiliki Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	Kec.	13	15	15	15	15	15	DINAS PPKB PPPA
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasandan eksploitasi	Kec. Kepolisian	13 1	15 15	15 2	15 2	15 2	15 2	DINAS PPKB PPPA KEPOLISIAN
			JumlahSDM unit layanan telah dilatih managemen kasus	orang	38 1	38 1	80 1	80 1	80 1	80 1	DINAS PPKB PPPA KEPOLISIAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKS I	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNGJAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Sosialisasi pembebasan anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah daerah yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di Destinasi Wisata di Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Pariwisata lainnya	TitikDaerah	25	-	26	26	-	-	DISPARPORA
			Jumlah daerah yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Kec.	13	13	15	15	15	15	DINAS PPKB PPPA
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebasan anak dari eksploitasi	Kelurahan /Desa	0	0	5	10	15	20	DINAS PPKB PPPA DISPARPORA
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Media	5	5	9	9	9	9	DINAS PPKB PPPA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah zona bebas pekerja Anak	Kabupaten	0	0	1	2	3	4	DISNAKER
		Pengintegrasian Isu Pekerja Anak	Jumlah yang mengintegrasikan isu pekerja Anak kedalam Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Kabupaten	0	0	0	0	0	0	DISNAKER
		Penanganan Kasus Pekerja Anak	Pekerja anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus	1	1	1	1	1	1	DISNAKER KEPOLISIAN
		Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan Pekerja Anak	Perusahaan	600	100	150	150	150	200	DISNAKER

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNGJAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22a.	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Korban penyalahgunaan Napza Anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada balai rehabilitasi sosial	Anak	0	5	5	5	5	5	DINSOS DINAS PPKB PPPA DINKES BNN
			Jumlah Anak penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi difasilitas rehabilitasi Milik BNN	Orang	0	0	0	0	0	0	BNN
		Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat sosialisasi Internet Aman untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Kabupaten	0	0	25	50	75	100	DINAS PPKB PPPA DISKOMINFO
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah Desa pencegahan bebas pornografi	Desa/ Kelurahan	18	18	20	30	30	30	DPMD DESA/KELURAHAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22b.	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	Kegiatan	1kali	0	2	2	2	2	DINSOS BPBD DINAS PMD
		Fasilitasi desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/Kelurahan	55	55	60	65	70	75	
		Perlindungan sosial bagianak korban bencana	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	740	1160	1230	1300	1370	1440	BPBD DISDIKBUD
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Kabupaten	0	0	2	2	2	2	DINSOS
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik anak tentang Perlindungan anak dari bencana	Orang	0	0	200	200	200	200	DINSOS BPBD

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak Korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial	%	0	0	50	50	50	50	DINSOS
		Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	DINSOS
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah	Dokumen	0	0	0	0	0	0	BPBD DINAS LINGKUNGAN HIDUP BAPPEDA
			Jumlah desa berketahanan iklim	Desa/ Kelurahan	0	0	0	0	0	0	DINAS PMD BPBD DESA KELURAHAN

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
23a.	Pelayanan bagi Anak disabilita, kelompok Minoritas dan terisolasi	1.Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan anak disabilitas	Jumlah Kecamatan /Kelurahan /Desa tentang data advokasi	Angka	Kec.15 Desa.20 Kec.- Desa.-	15 30 - -	5 15 - -	5 15 - -	5 15 - -	5 15 - -	DINAS PPKB PPPA DINSOS
		2.Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas, dan terisolasi	Jumlah Forum Koordinasi yang ada di tingkat Kecamatan /Kelurahan/Desa	Angka	Kec.13 Desa.18 Kec.- Desa.- Kec.- Desa.- Kec& Desa.40	13 18 - - - -	15 20 - - - -	15 30 - - - -	15 30 - - - -	15 40 - - - 80	DINAS PPKB PPPA DINSOS DISDIKBUD GUGUS TUGAS KLA
		3.Jumlah Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)	Jumlah Media KIE	Angka	-	-	1	1	-	-	DINAS PPKB PPPA
		4.Jumlah lembaga layanan yang mendapat-kan pelatihan penangan-an perlindungan anak berkebu-tuhan khusus	Jumlah lembaga layanan ditingkat Kecamatan /Kelurahan /Desa	Angka	Kec & Desa. 3 (Lembaga Ket Dinsos)	-	-	-	-	-	DINSOS

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR2 021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		5. Jumlah Kecamatan/Kelurahan /Desa yang difasilitasi untuk pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	Jumlah Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Angka (belum ada Kecamatan /Kelurahan /Desa keterangan DINSOS)	Kec- Desa.-	- -	- -	- -	- -	- -	DINSOS
23b.	Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (PSM)	1. Jumlah yang diadvokasi tentang pelaksanaan perlindungan anak PSM	Jumlah Kecamatan /Kelurahan /Desa tentang data advokasi	Angka	Kec.15 Desa.20	15 30	15 5	15 5	15 5	15 5	DINAS PPKB PPPA
		2. Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak kelompok minoritas dan teritorial serta anak PSM	Jumlah forum koordinasi yang ada di tingkat Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Angka	Kec.15 Desa 20 Kec dan Desa 40	15 30 40	15 30 50	15 40 60	- - 70	- - 80	DINAS PPKB PPPA DINAS PMD KECAMATAN DESA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3. Jumlah media KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) melalui media publik tentang perlindungan anak berkebutuhan khusus, terutama bagi anak PSM	Jumlah Media KIE	Angka (belum ada media sampai tahun ini, keterangan dari kominfo)	5	9	9	9	9	9	DINAS PPKB PPPA
24a.	Penyelesaian Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) Melalui Diversi (Khusus Pelaku)	1. Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah anak dengan sarana prasarana yang memadai	Jumlah lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)	Angka (sampai saat Ini belum ada LPKA)	-	-	-	-	-	-	BAGIAN HUKUM BAPAS DINSOS
		2. Presentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi ditingkat penyidikan	Jumlah anak ABH	%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- 100%	- -	- -

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi anak	Jumlah LPKA	Angka	- - - Tidak terdapat LPKA di Kabupaten Madiun	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	BAPAS BAGIAN HUKUM DINSOS DISDIKBUD
		4.Persentase ABH yang memperoleh hak layanan integrasi	Jumlah ABH	%	-	-	-	-	-	-	DINAS PPKB PPPA BAGIAN HUKUM DINSOS BAPAS
		5.Jumlah LPK yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standart	Jumlah LPKA	Angka	-	-	-	-	-	-	
		6.Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di Kabupaten	Jumlah LPKS dan RPS ditingkat Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Angka	- -	- -	- -	- -	- -	- -	DINAS PPKB PPPA BAPAS BAGIAN HUKUM
		7.Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan	Angka	- 26 Kasus	- 26 Kasus	- 26 Kasus	- 26 Kasus	- 26 Kasus	- 26 Kasus	BAPAS DINAS PPKB PPPA KEPOLISIAN BAG HUKUM

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		8.Peningkatan kapasitas APH	Jumlah Kegiatan (Seminar /Diklat /BIMTEK)	Angka	6	7	8	9	-	-	DINAS PPKB PPPA KEPOLISIAN BAG HUKUM
		9.Jumlah lokasi yang memiliki layanan ruang pelayanan khusus (RPK) kepolisian sesuai standart pelayanan minimal	Jumlah lokasi RPK	Angka	2	2	2	2	-	-	KEPOLISIAN
24b.	Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmanisasi akibat dari pelabelan terkait dengankondisi orang tuanya	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di Kabupaten	Jumlah kegiatan	Angka (tidak ada anak yang terlibat jaringan terorisme, keterangan dari DINSOS)	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	DINAS PPKB PPPA BAGIAN HUKUM DINSOS POLRESTA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		10. Peningkatan kapasitas APH	Jumlah Kegiatan (Seminar /Diklat /BIMTEK)	Angka	6	7	8	9	-	-	DINAS PPKB PPPA KEPOLISIAN BAG HUKUM
		11. Jumlah lokasi yang memiliki layanan ruang pelayanan khusus (RPK) kepolisian sesuai standart pelayanan minimal	Jumlah lokasi RPK	Angka	2	2	2	2	-	-	KEPOLISIAN
24b.	Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmanisasi akibat dari pelabelan terkait dengankondisi orang tuanya	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan anak korban jaringan terorisme di Kabupaten	Jumlah kegiatan	Angka (tidak ada anak yang terlibat jaringan terorisme, keterangan dari DINSOS)	1 1	1 -	1 -	1 -	- -	- -	DINAS PPKB PPPA BAGIAN HUKUM DINSOS POLRESTA

NO	INDIKATOR	RENCANA AKSI	UKURAN	SATUAN	DATA DASAR 2021	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jumlah Kecamatan/ Kelurahan/Desa yang difasilitasi dalam Pencegahan Agar anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Jumlah Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Angka (dari 15 kecamatan, ada 13 kecamatan yang sudah melakukan penyuluhan sosialisasi pencegahan terorisme, keterangan dari P2TP2A)	Kec.13 Desa.18	13 18	15 20	15 30	15 30	15 40	DINAS PPKB PPPA DPMD KECAMATAN DESA/KELURAHAN KEPOLISIAN

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO